Sejarah Pergerakan Nasional: Peran Nahdlatul Ulama dalam Dinamika Sosial-Politik dan Pembentukan Identitas Kolektif Bangsa Indonesia

Nana Aprilia

UIN Alauddin Makassar

Rahmi Damis

UIN Alauddin Makassar

Syamzan Syukur

UIN Alauddin Makassar

Korespondensi penulis: apriliana931@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the importance of understanding the contribution of Nahdlatul Ulama (NU) in preserving religious traditions and strengthening national identity amidst the socio-political dynamics since the colonial period. The aim of this study is to describe the strategic role of NU in the national struggle, the formation of social solidarity, and the construction of the collective identity of the Indonesian nation. The method used is library research, with data collected through books, classical literature, scientific journals, and other relevant documents. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings show that NU, which was founded on January 31, 1926, in Surabaya at the initiative of pesantren scholars such as KH Hasyim Asy'ari and KH Abdul Wahab Hasbullah, emerged as a response to threats against traditional religious practices due to Wahhabi influence and the colonial conditions under Dutch rule. Through the establishment of the Hijaz Committee and the founding of NU, the scholars sought to uphold the teachings of Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) and preserve the diversity of Islamic practices in Indonesia through a more structured organization. Throughout its history, NU has played a significant role in the national movement by rejecting the Volksraad, participating in MIAI and Masyumi during the Japanese occupation, and issuing the 1945 Jihad Resolution, which served as moral encouragement for the struggle for independence. NU has also contributed to the formation of social solidarity, the cultivation of nationalism, the drafting of the 1945 Constitution, and the reinforcement of Pancasila. The implications of this research indicate that NU has contributed not only in the religious sphere but has also become one of the key foundations in building Indonesia's national identity and socio-political welfare.*

Keywords: *Collective Identity, Nahdlatul Ulama, National Movement, Socio-Politics*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjaga tradisi keagamaan dan memperkuat identitas bangsa di tengah dinamika sosial-politik sejak masa penjajahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan peran strategis NU dalam perjuangan nasional, pembentukan

solidaritas sosial, dan konstruksi identitas kolektif bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah library research dengan pengumpulan data melalui buku, literatur klasik, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan. Analisis data dilakukan melalui langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU, yang lahir pada 31 Januari 1926 di Surabaya atas inisiatif para ulama pesantren seperti KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdul Wahab Hasbullah, merupakan respon terhadap ancaman praktik keagamaan tradisional akibat pengaruh Wahabi serta kondisi kolonial Belanda. Melalui pembentukan Komite Hijaz dan pendirian NU, para ulama berupaya mempertahankan ajaran Ahlul Sunnah wal Jama'ah (Aswaja) dan menjaga keberagaman Islam di Indonesia dengan organisasi yang terstruktur. Dalam perjalanannya, NU berperan signifikan dalam pergerakan nasional melalui penolakan Volksraad, keterlibatan di MIAI dan Masyumi pada masa Jepang, serta Resolusi Jihad 1945 yang memotivasi perjuangan kemerdekaan. NU juga berkontribusi pada pembentukan solidaritas sosial, penanaman nasionalisme, penyusunan UUD 1945, dan penguatan Pancasila. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa NU tidak hanya berjasa di bidang keagamaan, tetapi juga menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun identitas nasional dan kesejahteraan sosial-politik Indonesia.

Kata kunci: Identitas Kolektif, Nahdlatul Ulama, Pergerakan Nasional, Sosial-Politik

LATAR BELAKANG

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh signifikan dalam sejarah dan perkembangan sosial-politik Indonesia. Berdiri pada 31 Januari 1926, NU lahir sebagai reaksi terhadap tantangan zaman, baik berupa penjajahan kolonial Belanda maupun modernisasi yang semakin berkembang di masyarakat Muslim Indonesia. Didirikan oleh KH. Hasyim Asyari dan tokoh-tokoh lain yang memiliki visi untuk mempertahankan ajaran Islam yang moderat, NU bertujuan untuk mengembangkan pemahaman Islam yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, toleransi, dan persatuan.

Sebagai organisasi yang mendasarkan ajaran pada mazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah, NU menekankan pentingnya pemahaman agama yang sesuai dengan tradisi, namun tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. Dalam perkembangannya, NU telah menjadi organisasi yang tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Melalui lembaga pendidikan yang dikelolanya, seperti pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, NU berperan dalam mencetak ulama dan santri yang siap menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan akar tradisionalnya.

Peran NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai salah satu kekuatan yang konsisten mendukung kemerdekaan, NU memiliki andil besar dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Melalui keputusan fatwa jihad yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asyari, NU memberikan dorongan moral dan spiritual kepada umat Islam untuk berperang melawan penjajahan, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. NU tidak hanya sekadar menjadi kekuatan agama, tetapi juga kekuatan sosial dan politik yang berkontribusi pada pembentukan dasar-dasar negara Indonesia, terutama dalam menjaga keberagaman dan kerukunan umat beragama.

Selain aspek keagamaan, NU juga menjadi representasi perjuangan ekonomi-politik umat Islam pribumi, terutama di pedesaan. Pesantren menjadi pusat perlawanan budaya dan ekonomi terhadap sistem kolonial. Dengan menyuarakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan, NU menjadi lokomotif sosial bagi mereka yang terpinggirkan oleh sistem kapitalisme kolonial dan feodalisme lokal (Rosila & Khobir, 2024). Pada era pasca-kemerdekaan, NU turut berperan aktif dalam pembangunan negara, baik dari segi politik maupun sosial. Organisasi ini mendukung implementasi Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. NU juga menjadi pelopor dalam mengembangkan politik Islam yang inklusif dan demokratis, dengan menekankan pentingnya musyawarah dan konsensus dalam mengambil keputusan politik. Selain itu, NU juga sangat mendukung program-program pemerintah dalam bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, NU tetap berkomitmen untuk menjaga tradisi dan nilai-nilai keislaman yang moderat. Keberadaannya tidak hanya sebagai penjaga ajaran Islam yang murni, tetapi juga sebagai jembatan antara perkembangan zaman dan tradisi agama yang telah lama hidup di masyarakat. NU terus memegang peranan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia, dengan aktif terlibat dalam dialog antar agama dan budaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh toleransi. Selain itu, NU juga sangat berperan dalam perkembangan ekonomi melalui sektor pemberdayaan umat, dengan mendirikan berbagai lembaga ekonomi seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan koperasi yang memberi akses keuangan bagi masyarakat, terutama di kalangan

pedesaan dan mereka yang belum terjangkau oleh layanan perbankan. Melalui lembaga-lembaga ini, NU membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada prinsip-prinsip keislaman yang berkeadilan.

Dengan segala kontribusinya yang luas dan beragam, NU tetap menjadi bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam konteks sosial, politik, dan budaya, NU terus memainkan peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai organisasi keagamaan tetapi juga sebagai agen perubahan yang menjaga kelangsungan nilai-nilai tradisional sekaligus merespons dinamika zaman yang terus berkembang. Sebagai organisasi yang berbasis pada prinsip keislaman yang moderat, NU tetap relevan dalam membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan damai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode library research (kajian pustaka). Data utama berasal dari berbagai sumber pustaka seperti buku, literatur klasik, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya. Data pendukung mencakup semua referensi yang relevan dengan topik penelitian. Metode analisis melibatkan studi mendalam terhadap buku, literatur klasik, dan jurnal ilmiah. Proses analisis data meliputi tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan (Hidayat, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar belakang berdirinya Nahdatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) resmi didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya. Organisasi ini dibentuk oleh para ulama dan tokoh agama tradisional Indonesia sebagai bentuk tanggapan terhadap situasi keagamaan serta kondisi sosial-politik yang berkembang pada masa penjajahan Belanda, sekaligus sebagai reaksi atas arus pemikiran Islam yang berkembang di dunia Islam, khususnya di wilayah Jazirah Arab. NU berkomitmen untuk mempertahankan warisan keagamaan lokal dengan fokus pada pengembangan dan pemeliharaan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia dan menganut mazhab Imam Syafi'i (Haris & Dardum, 2021). Meskipun NU adalah organisasi keagamaan, pengaruhnya meluas ke ranah politik berkat jaringannya yang luas di seluruh Indonesia, memberikan NU peran penting dalam pengambilan keputusan

publik dan politik (Sayuti et al., 2018). Pengaruh ini memberikan NU peran penting dalam pengambilan keputusan publik dan politik di negara ini (Hidayat et al., 2024).

Latar Belakang Berdirinya NU dapat dijelaskan dibawah ini

1. Ancaman terhadap Praktik Keagamaan Tradisional

Pada awal abad ke-20, munculnya gerakan Wahabi di kawasan Jazirah Arab bertujuan untuk memberantas praktik-praktik keagamaan yang mereka anggap sebagai bentuk bid'ah, seperti kegiatan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan pengamalan ajaran dari mazhab-mazhab tertentu. Gerakan ini membawa pemahaman yang lebih ketat terhadap ajaran Islam dan memperoleh dukungan kuat dari Raja Ibnu Saud, penguasa baru Arab Saudi, yang berambisi menjadikan mazhab Wahabi sebagai satu-satunya mazhab resmi di wilayah Mekkah dan Madinah. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah rencana penghancuran makam Nabi Muhammad SAW di Madinah, yang menimbulkan kekhawatiran serta penolakan dari berbagai kalangan umat Islam, termasuk dari masyarakat Muslim di Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai ancaman terhadap keragaman praktik ibadah dalam Islam dan menyakiti perasaan umat yang menganut pemahaman Islam yang lebih moderat dan inklusif.

Di Indonesia, rencana tersebut menimbulkan kekhawatiran, khususnya di kalangan ulama pesantren yang menganut ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), yang selama ini menjadi landasan utama dalam menjalankan kehidupan beragama mereka. Sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan itu, para ulama Indonesia mengambil tindakan nyata dengan membentuk Komite Hijaz pada bulan Januari 1926. Tujuan utama dari pembentukan komite ini adalah untuk mengirim utusan ke Muktamar Dunia Islam di Mekkah guna menyampaikan penolakan terhadap upaya penghancuran makam Nabi Muhammad SAW serta terhadap pemaksaan mazhab Wahabi sebagai satu-satunya mazhab resmi di dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Komite Hijaz ini dipimpin oleh KH Abdul Wahab Hasbullah dan mendapat dukungan penuh dari KH Hasyim Asy'ari, dua tokoh terkemuka yang memiliki pengaruh besar di kalangan umat Islam Indonesia (Ehwanudin, 2016).

Pembentukan Komite Hijaz menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan gerakan Islam di Indonesia, yang kemudian mendorong lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926. NU hadir dengan misi utama untuk melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dan melindungi keragaman dalam praktik keagamaan umat

Islam di tanah air. Organisasi ini menjadi sarana bagi umat Islam Indonesia yang ingin mempertahankan tradisi keislaman yang toleran dan inklusif, sekaligus memberikan respons terhadap munculnya pandangan-pandangan keagamaan yang cenderung ekstrem. Seiring waktu, NU terus mengalami pertumbuhan dan menjelma menjadi salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial-politik dan memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam kerangka masyarakat yang majemuk.

2. Kebutuhan akan Organisasi Keagamaan yang Sistematis

Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) resmi didirikan, sejumlah ulama telah membentuk organisasi-organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon pada tahun 1916 dan Nahdlatut Tujjar pada tahun 1918. Kedua organisasi ini bertujuan membangkitkan kesadaran nasional serta memperkuat perekonomian umat Islam. Meskipun demikian, upaya tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam merespons berbagai tantangan zaman. Kehadiran NU kemudian menjadi kelanjutan dari inisiatif-inisiatif tersebut, dengan struktur organisasi yang lebih tertata dan jangkauan yang lebih luas dalam memperjuangkan kepentingan umat (Mubin, 2020).

3. Peran KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdul Wahab Hasbulla

KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdul Wahab Hasbullah adalah dua tokoh utama yang memiliki peran yang sangat besar dalam pendirian Nahdlatul Ulama (NU), yang hingga saat ini menjadi salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. KH Hasyim Asy'ari dikenal sebagai seorang ulama besar yang tidak hanya mendirikan Pesantren Tebuireng, tetapi juga merupakan figur yang sangat dihormati dan berpengaruh di kalangan pesantren tradisional. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki wawasan luas tentang ajaran Islam, KH Hasyim Asy'ari memiliki kemampuan untuk menggabungkan tradisi keagamaan yang sudah ada dengan pemikiran Islam yang moderat. Pesantren Tebuireng yang didirikannya menjadi pusat pendidikan yang penting dalam pengembangan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dan memberikan kontribusi besar dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia.

Di sisi lain, KH Abdul Wahab Hasbullah tidak hanya dikenal sebagai tokoh utama di balik pendirian Nahdlatul Ulama, tetapi juga memainkan peran krusial dalam menyebarkan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dan menjadi motor penggerak dalam

pembentukan organisasi ini. Sebagai ulama yang memiliki kecerdasan dan pandangan jauh ke depan, beliau menyadari pentingnya sebuah organisasi yang mampu mengawal ajaran Islam yang moderat sekaligus melestarikan tradisi keagamaan Islam yang telah mengakar kuat di Indonesia selama berabad-abad. KH Abdul Wahab Hasbullah memahami bahwa umat Islam Indonesia tengah menghadapi tantangan besar, terutama dari munculnya paham-paham keagamaan yang bersifat radikal dan berpotensi mengganggu kerukunan sosial serta keberagaman dalam kehidupan beragama di Nusantara (Haidar, 1994).

Pada tahun 1926, dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pesatnya penyebaran paham Wahabi serta ancaman terhadap praktik keagamaan tradisional, KH Hasyim Asy'ari bersama KH Abdul Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Ulama di kota Surabaya. Organisasi ini dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menjaga dan merawat ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, yang dipandang sebagai jalan tengah dalam memahami Islam secara moderat dan inklusif. Tujuan utama pendirian NU adalah melindungi keragaman praktik keagamaan yang telah lama hidup di tengah masyarakat Indonesia, serta menanggapi masuknya paham-paham keagamaan yang dinilai dapat merusak nilai-nilai budaya dan tradisi Islam lokal. Melalui NU, kedua tokoh tersebut berupaya memastikan bahwa umat Islam di Indonesia tetap dapat menjalankan ajaran Islam yang selaras dengan kondisi sosial, budaya, dan historis bangsa, tanpa terpengaruh oleh paham-paham yang berpotensi memecah belah umat.

4. Reaksi terhadap Perkembangan Dunia Islam

NU juga lahir sebagai respon terhadap perkembangan dunia Islam yang sedang menghadapi tantangan internal dan eksternal. Salah satu tantangan utama pada waktu itu adalah upaya pembaruan yang dilakukan oleh beberapa kelompok, termasuk golongan Wahabi, yang ingin memurnikan ajaran Islam dengan cara menghilangkan berbagai tradisi yang sudah dianggap sebagai budaya lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, di Indonesia sendiri, terdapat keberagaman dalam praktik keagamaan yang selama ini berkembang dengan khas, sehingga diperlukan suatu wadah yang bisa memayungi keberagaman tersebut (Rahim, 2013).

5. Peran NU dalam Menanggulangi Penjajahan dan Politik

Selain dari segi agama, Nahdlatul Ulama (NU) juga berperan aktif dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang, menunjukkan komitmennya yang

tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan, tetapi juga pada upaya mempertahankan kedaulatan bangsa. Pada masa penjajahan, NU mengembangkan berbagai sayap perjuangan yang bertujuan mengorganisir umat Islam untuk turut serta dalam perlawanan terhadap penjajah. Organisasi ini, yang memiliki basis massa yang luas, memainkan peran penting dalam menggerakkan umat untuk berjuang demi kemerdekaan. NU mendirikan berbagai organisasi yang bergerak di bidang militer maupun non-militer untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan, dengan banyak anggotanya yang terlibat langsung dalam pertempuran melawan pasukan Belanda dan Jepang (Syukriyah, 2016).

Di samping itu, Nahdlatul Ulama turut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menjalin kolaborasi erat bersama berbagai kelompok pergerakan nasional, baik yang bercorak sekuler maupun keagamaan. NU memahami bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat diraih apabila seluruh komponen bangsa bersatu, menyingkirkan perbedaan ideologi, dan bekerja bersama demi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Atas dasar itu, NU aktif dalam berbagai aktivitas politik, baik secara langsung maupun melalui jalur tidak langsung, guna mendukung terwujudnya Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Seiring waktu, Nahdlatul Ulama (NU) tidak lagi hanya berkonsentrasi pada urusan keagamaan, tetapi juga memperluas kiprahnya dalam ranah sosial dan politik. NU menyadari bahwa keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan politik sangat penting demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini tercermin dari partisipasi NU dalam merumuskan berbagai kebijakan nasional yang mendukung kesejahteraan rakyat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komitmen tersebut juga tampak dalam kontribusi aktif NU terhadap pembangunan nasional, pelestarian keseimbangan sosial, serta pembelaan terhadap hak-hak masyarakat kecil yang kerap terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, NU kini hadir sebagai organisasi yang tidak hanya membina umat secara spiritual, tetapi juga memainkan peran strategis dalam proses pembangunan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.

6. Tujuan Pendirian NU

Nahdlatul Ulama (NU) dibentuk dengan misi utama untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam yang moderat dan berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah.

Selain itu, NU juga bertujuan menjadi wadah yang efektif dalam meningkatkan taraf hidup umat Islam di Indonesia, mencakup berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di tanah air, NU menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan kesejahteraan umat melalui pendekatan menyeluruh yang tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup kehidupan sosial dan politik. NU pun menjalankan peran penting tidak hanya dalam membina individu atau komunitas tertentu, tetapi juga dalam membangun struktur masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

NU juga berusaha mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang dapat diterima oleh seluruh umat Muslim, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang telah ada dan dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara ajaran agama dan perkembangan zaman yang terus berubah. Dalam konteks ini, NU senantiasa menekankan pentingnya menjaga kelestarian budaya lokal serta prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kedamaian, persatuan, dan toleransi di tengah keragaman umat manusia. Dengan cara ini, NU berusaha menghindari polarisasi yang seringkali terjadi dalam kehidupan beragama, serta mengutamakan persatuan umat.

Prinsip utama yang diusung oleh NU adalah Islam yang toleran, moderat, dan menghargai keberagaman. NU tidak hanya mengajarkan ajaran agama yang seimbang dan bijaksana, tetapi juga aktif mengajak umat untuk berinteraksi secara damai dan harmonis dengan sesama komunitas keagamaan di berbagai tingkatan, mulai dari lokal hingga internasional. Islam yang moderat yang dimaksud oleh NU adalah Islam yang menghindari ekstremisme dan radikalisme, serta lebih menekankan pada pendekatan yang bijak dalam menghadapi perbedaan dan tantangan zaman. Hal ini mencerminkan sikap inklusif NU yang tidak hanya memfokuskan pada internal umat Islam saja, tetapi juga mengedepankan kepentingan bersama dalam membangun negara yang damai dan berkeadilan.

Dengan prinsip-prinsip ini, NU mengambil peran penting dalam berbagai kegiatan lingkup sosial publik dan kebijakan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam, baik melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, maupun melalui advokasi kebijakan yang berpihak kepada umat. Dalam bidang pendidikan, misalnya, NU memiliki banyak pesantren yang menjadi pusat pengajaran agama dan juga

pembentukan karakter generasi muda yang memahami ajaran Islam secara mendalam namun tetap terbuka terhadap dinamika sosial yang ada. Melalui komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam yang moderat dan toleran ini, NU berusaha menjadi contoh bagi umat Islam di Indonesia dan dunia untuk mengamalkan ajaran agama dengan cara yang damai dan penuh kasih sayang, sekaligus menjaga keberagaman dalam tatanan kehidupan masyarakat dan negara.

B. Peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peranan penting dan strategis dalam upaya meraih kemerdekaan Indonesia, baik saat masa kolonial Belanda maupun ketika berada di bawah pendudukan Jepang. Sebagai organisasi Islam terbesar di tanah air, NU tidak semata-mata bergerak dalam bidang keagamaan, melainkan juga berkontribusi secara aktif di ranah sosial, politik, dan pendidikan guna memperkuat gerakan nasional menuju kemerdekaan (Romzi, 2012).

1. Latar Belakang Sosial dan Keagamaan

Pada masa awal abad ke-20, umat Islam di Indonesia tengah berjuang menghadapi berbagai ujian dari berbagai arah, termasuk proses kristenisasi yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Selain itu, terdapat eksploitasi ekonomi, penanaman budaya Barat melalui sistem pendidikan kolonial, dan stratifikasi sosial yang menekan golongan bumiputera. Kondisi ini memicu kesadaran para ulama untuk bersatu dan membentuk organisasi yang dapat melawan penjajahan serta mempertahankan ajaran Islam tradisional (Farih, 2016).

2. Pendirian NU dan Komitmennya terhadap Perjuangan Nasional

Nahdlatul Ulama resmi dibentuk pada tanggal 31 Januari 1926 oleh KH Hasyim Asy'ari. di Surabaya. Organisasi ini didirikan sebagai bentuk reaksi terhadap dinamika keagamaan dan situasi sosial dan dinamika politik selama masa pendudukan Belanda serta perkembangan pemikiran Islam di dunia Islam, khususnya di Jazirah Arab. NU berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan pemahaman Islam moderat ala Ahlussunnah wal Jama'ah serta keterlibatan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

3. Peran NU pada Masa Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, NU menolak untuk terlibat dalam Volksraad (Dewan Rakyat Hindia Belanda) karena dianggap tidak memberikan kemerdekaan yang

sejati bagi rakyat Indonesia. Sebagai gantinya, NU fokus pada penguatan internal melalui pendidikan agama dan sosial. Melalui jaringan pesantren, NU berhasil mencetak kader-kader ulama yang kemudian menjadi motor penggerak perlawanan terhadap penjajah.

4. Peran NU pada Masa Pendudukan Jepang

Selama pendudukan Jepang, NU menghadapi dilema antara sikap kooperatif dan non-kooperatif. Namun, NU memilih untuk bersikap kooperatif dengan memanfaatkan isu kolaborasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. NU mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937 sebagai wadah untuk menyatukan umat Islam dalam menghadapi penjajahan. MIAI kemudian bergabung dengan organisasi lain untuk membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), yang menjadi cikal bakal perjuangan politik Islam di Indonesia (Saepulah, 2022).

5. Resolusi Jihad dan Perjuangan Fisik

Pada 22 Oktober 1945, NU mengumumkan Resolusi Jihad yang menafsirkan perlawanan terhadap penjajah sebagai kewajiban suci dalam Islam, yakni jihad fi sabilillah, wajib hukumnya bagi umat Islam. Resolusi ini menjadi landasan moral dan spiritual bagi laskar-laskar perjuangan, seperti Hizbullah dan Sabilillah, yang terdiri dari para ulama, santri, dan umat Islam. Mereka berperan aktif dalam pertempuran fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

6. Kontribusi dalam Pembentukan Negara dan Kehidupan Sosial

Pasca kemerdekaan, Nahdlatul Ulama (NU) terus menunjukkan kiprah aktifnya di bidang politik dan sosial. NU turut andil dalam proses perumusan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia serta menjadi bagian dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di samping itu, NU juga berperan dalam berbagai aktivitas sosial, seperti penyaluran bantuan kemanusiaan, penguatan sektor ekonomi masyarakat, serta upaya meningkatkan kesejahteraan umat (KI, n.d.).

Setelah kemerdekaan, Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan untuk keluar dari Masyumi pada tahun 1952 dan mendirikan Partai NU sebagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam secara lebih langsung di dunia politik. Langkah ini menunjukkan niat NU untuk berperan lebih besar dalam menentukan arah kebijakan politik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Pada Pemilu 1955, Partai NU berhasil meraih posisi yang cukup signifikan, yaitu

peringkat ketiga, yang mengukuhkan NU sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia pada saat itu. Selama periode ini, peran NU sangat terlihat dalam upaya advokasi pendidikan Islam dan hukum keluarga Islam yang diperjuangkan oleh para anggotanya di parlemen. NU turut mengusung isu-isu penting terkait dengan pengakuan terhadap sistem hukum Islam dan perbaikan kualitas pendidikan agama, yang menjadi salah satu prioritas dalam agenda politik mereka. Namun, peran aktif NU dalam politik formal mulai terkendala pada masa Orde Baru. Rezim Soeharto yang sangat otoriter memberlakukan kebijakan depolitisasi terhadap partai-partai Islam, termasuk NU. Kebijakan tersebut mengharuskan partai-partai politik untuk tunduk kepada pemerintah, yang menyebabkan NU mengurangi keterlibatannya dalam kegiatan politik secara langsung. Meskipun demikian, NU tidak sepenuhnya menghilangkan peran politiknya. Melalui jaringan ulama dan pesantrennya, NU tetap berfungsi sebagai suara kritis terhadap kebijakan rezim Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, meskipun NU tidak memiliki representasi politik yang signifikan, ia tetap berperan aktif dalam mengarahkan opini masyarakat serta menolak kebijakan yang bertolak belakang dengan ajaran agama dan kemanusiaan. Puncak dari peran politik NU dalam periode ini terjadi pada akhir 1990-an, ketika kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendorong gerakan reformasi yang berujung pada tumbangannya rezim Soeharto pada tahun 1998. Di bawah kepemimpinan Gus Dur, NU menjadi bagian integral dari gerakan reformasi, dengan memperjuangkan demokratisasi dan kebebasan politik di Indonesia. Gus Dur sendiri menjadi simbol perubahan dengan terpilihnya sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1999, yang membuka era baru dalam kehidupan politik Indonesia, terutama bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dalam sistem politik Orde Baru. Meskipun mengalami depolitisasi pada masa Orde Baru, NU tetap menjadi kekuatan penting dalam mendorong perubahan sosial dan politik di Indonesia, berkontribusi besar dalam transisi menuju demokrasi pasca-Soeharto (Yatasha et al., 2023).

7. Pendidikan dan Dakwah sebagai Pilar Perjuangan

Pendidikan dan dakwah menjadi pilar utama dalam perjuangan NU yang telah terbukti memiliki dampak luas terhadap masyarakat Indonesia. Melalui pesantren yang dimilikinya di berbagai pelosok negeri, NU telah berperan besar dalam mendidik generasi yang menguasai pengetahuan agama secara mendalam., tetapi juga dilengkapi

dengan semangat nasionalisme yang tinggi, yang menjadikan mereka pribadi-pribadi yang peduli terhadap tanah air dan siap berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Dakwah yang dilakukan oleh NU tidak hanya bertujuan untuk memperkuat iman umat, tetapi juga untuk membangkitkan kesadaran yang mendalam akan pentingnya perjuangan untuk kemerdekaan serta pembangunan bangsa, dengan harapan agar umat Islam dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Melalui pendekatan yang holistik, NU menekankan pentingnya bagi umat untuk mengutamakan kepentingan bersama di samping kepentingan individu bersama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, berkeadilan, dan penuh kedamaian.

C. Dampak peran Nahdatul Ulama terhadap kesadaran politik dan sosial masyarakat Indonesia pada masa pergerakan nasional

Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam pergerakan nasional Indonesia sangat signifikan, terutama dalam membentuk kesadaran politik dan sosial masyarakat pada masa tersebut. Sebagai organisasi yang berfokus pada agama dan sosial, NU turut menggerakkan umat Islam untuk berpartisipasi dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan Jepang. NU tidak hanya berperan dalam aspek keagamaan, tetapi juga mempengaruhi kesadaran politik dengan mengedepankan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memberikan edukasi politik kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Melalui tokoh-tokohnya seperti KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdul Wahab Hasbullah, NU menggerakkan umat untuk terlibat dalam organisasi perjuangan, seperti Syarikat Islam dan organisasi lainnya yang menuntut kemerdekaan. NU juga memperkenalkan nilai-nilai sosial yang mendukung perubahan sosial yang lebih baik, seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, NU berkontribusi besar dalam membangun kesadaran politik dan sosial masyarakat Indonesia, mendorong partisipasi aktif mereka dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan mengubah struktur sosial yang ada pada masa tersebut (Safiuddin et al., 2024).

1. Pendidikan dan Dakwah sebagai Pilar Kesadaran Sosial dan Politik

Pendidikan dan dakwah merupakan dua pilar utama yang digunakan oleh NU untuk membangkitkan kesadaran sosial dan politik masyarakat Indonesia. Melalui pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, NU mengajarkan nilai-nilai agama yang mengajarkan umat Islam untuk peduli terhadap sesama dan berperan aktif

dalam masyarakat. Salah satu ciri khas NU adalah upaya untuk memadukan ajaran agama dengan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berfokus pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga mencakup pembelajaran tentang nasionalisme, perjuangan kemerdekaan, dan hak-hak politik masyarakat.

2. Peran NU dalam Membangkitkan Kesadaran Politik Masyarakat

Sejak awal kemunculannya, Nahdlatul Ulama (NU) telah mendorong umat Islam untuk terlibat aktif dalam ranah politik. Komitmen ini tercermin dari sikap tegas NU dalam menolak kebijakan-kebijakan kolonial Belanda yang menindas umat Islam dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Salah satu bentuk nyata keterlibatan politik NU adalah keikutsertaannya dalam pembentukan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937, yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan umat Islam dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Selain itu, NU juga berkontribusi besar dalam pendirian Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), yang tidak hanya berfungsi sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga menjadi wadah perjuangan politik dalam mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui Masyumi, NU dapat lebih memperjuangkan kepentingan umat Islam dan masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal pembentukan negara dan sistem pemerintahan pasca-kemerdekaan (Izzatul Fajriyah, 2021).

3. Resolusi Jihad dan Peran Laskar NU dalam Perjuangan Fisik

Pada 22 Oktober 1945, NU mengeluarkan Resolusi Jihad yang menyatakan bahwa perjuangan melawan penjajahan adalah jihad fi sabilillah, yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Resolusi ini menjadi sangat berpengaruh dalam meningkatkan semangat perjuangan fisik melawan penjajah, terutama pasukan Jepang yang masih menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Laskar-laskar NU, seperti Hizbullah dan Sabilillah, memainkan peran vital dalam pertempuran-pertempuran melawan penjajah. Para santri dan ulama yang tergabung dalam organisasi-organisasi ini berperang dengan semangat yang tinggi, dengan keyakinan bahwa perjuangan mereka adalah bentuk pengabdian kepada Allah dan kewajiban moral untuk membela tanah air. Peran serta mereka dalam berbagai pertempuran tidak hanya menguatkan posisi umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menunjukkan bahwa

semangat agama dan nasionalisme bisa berjalan beriringan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kemerdekaan Indonesia. Peran ini tidak hanya penting dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan umat Islam dan masyarakat Indonesia secara umum. Laskar NU, dengan kekuatan fisik dan semangat juang yang tinggi, turut memberikan kontribusi besar dalam menghentikan upaya penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keberanian dan keteguhan mereka menjadi simbol dari perlawanan yang tidak hanya berdasarkan agama, tetapi juga dari rasa cinta tanah air yang mendalam, yang memperkokoh tekad bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan secara penuh.

4. Kontribusi dalam Membangun Solidaritas Sosial

NU juga memberikan dampak besar dalam membangun solidaritas sosial. Melalui berbagai program sosial, seperti bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, NU membantu masyarakat yang tertindas oleh penjajahan. NU mengorganisir umat Islam untuk saling membantu dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul akibat ketidakadilan penjajahan. Gerakan sosial ini memperkenalkan konsep bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya tentang mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan, tetapi juga tentang membangun solidaritas di dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan membangun kesadaran sosial, NU berhasil menyatukan umat Islam Indonesia di bawah bendera perjuangan kemerdekaan dan keadilan sosial. NU juga memberikan dampak besar dalam membangun solidaritas sosial yang kuat di kalangan umat Islam Indonesia.

Melalui berbagai program sosial yang dijalankan, seperti bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, NU berhasil memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang tertindas oleh penjajahan. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada perjuangan fisik, tetapi juga aktif dalam mengorganisir umat Islam untuk saling membantu, bekerja sama, dan mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul akibat ketidakadilan penjajahan. Dengan pendekatan yang holistik, NU mengajarkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya terbatas pada mempertahankan tanah air dari penjajahan, tetapi juga melibatkan upaya untuk membangun solidaritas di dalam masyarakat, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua lapisan.

Gerakan sosial yang dipelopori NU memperkenalkan konsep bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika setiap individu dalam masyarakat saling mendukung dan berjuang bersama demi kebaikan bersama. Dengan membangun kesadaran sosial yang mendalam, NU berhasil menyatukan umat Islam Indonesia di bawah bendera perjuangan yang tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan politik, tetapi juga menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Program-program sosial ini menjadi salah satu fondasi yang memperkokoh ikatan antar umat dan meletakkan dasar bagi tercapainya tujuan bangsa yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.

5. Peran NU dalam Pembentukan Identitas Nasional Indonesia

Selain perjuangan fisik, NU juga berperan dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Sebagai organisasi yang berbasis di pesantren, NU membentuk generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme tinggi, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama. NU percaya bahwa Indonesia bisa mencapai kemerdekaan dengan tetap menjaga keberagaman budaya dan agama yang ada, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan dalam kerangka negara bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, NU sangat mendukung pembentukan negara yang berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara yang mampu mengakomodasi keberagaman agama dan budaya di Indonesia. NU juga berperan aktif dalam pembentukan UUD 1945, yang merupakan dasar hukum negara Indonesia, serta dalam mengatur hubungan antara negara dan agama. Dampak dari peran NU terhadap kesadaran sosial dan politik masyarakat Indonesia pada masa pergerakan nasional sangat signifikan. Berikut beberapa dampak utamanya:

- a. Kesadaran Politik Umat Islam: NU berhasil menanamkan pentingnya kesadaran politik di kalangan umat Islam, mendorong mereka untuk berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara, dan perkembangan politik di Indonesia.
- b. Solidaritas Sosial yang Kuat: NU memupuk solidaritas sosial yang mengarah pada kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Gerakan sosial keagamaan yang dibawa oleh NU memperkuat rasa kebersamaan di kalangan umat Islam, yang selanjutnya berkembang menjadi kesadaran kolektif dalam membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

- c. Pengaruh dalam Pembentukan Negara dan Pemerintahan: NU berperan dalam pembentukan struktur negara Indonesia pasca-kemerdekaan, terutama dalam pengaturan hubungan antara agama dan negara serta dalam memperjuangkan hak-hak umat Islam di Indonesia.
- d. Pendidikan Nasionalisme dan Keagamaan: Melalui pesantren-pesantren dan sistem pendidikannya, NU menanamkan pentingnya nasionalisme yang berbasis pada ajaran Islam yang moderat dan menghargai keberagaman, sehingga melahirkan generasi yang memiliki kesadaran politik yang tinggi dan rasa cinta tanah air.

Beberapa tokoh penting NU yang sangat berpengaruh dalam pergerakan nasional:

- a. KH Hasyim Asy'ari – Pendiri NU, penggagas fatwa jihad 1945, anggota BPUPKI.
 - b. KH Wahid Hasyim – Menteri Agama pertama RI, pengembang kurikulum pendidikan Islam nasional.
 - c. KH Abdul Wahab Hasbullah – Pendiri Komite Hijaz, peletak dasar struktur NU modern.
 - d. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Tokoh reformasi, Presiden RI ke-4, pengusung Islam inklusif dan toleran (Nurul Huda, 2025).
6. Kontribusi NU dalam Demokrasi dan Toleransi

Dalam era yang semakin terpolarisasi ini, kontribusi NU sangat penting dalam menjaga kerukunan dan memperkokoh fondasi demokrasi Indonesia. Keberhasilan NU dalam memperkenalkan Islam yang moderat dan toleran telah memberikan contoh bagi dunia internasional tentang bagaimana agama dapat menjadi sumber perdamaian dan bukan konflik (Maghfiroh, 2023). Nahdlatul Ulama (NU) telah menunjukkan kiprah yang luar biasa dalam menjaga demokrasi dan keberagaman agama di Indonesia pasca-Orde Baru. Setelah era Soeharto, yang dikenal dengan rezim otoriternya, Indonesia memasuki masa reformasi yang membuka ruang bagi berbagai kelompok untuk terlibat dalam kehidupan politik dan sosial yang lebih terbuka dan inklusif. Dalam konteks ini, NU menjadi salah satu kekuatan utama yang berkontribusi pada penguatan demokrasi dan toleransi antarumat beragama.

Salah satu tokoh sentral yang memimpin gerakan ini adalah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1999. Gus Dur memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong prinsip pluralisme, penegakan hak asasi manusia (HAM), dan toleransi beragama di Indonesia. Sebagai pemimpin NU dan negara, Gus Dur memperkenalkan ide-ide yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman budaya, suku, agama, dan golongan sebagai kekuatan bangsa, bukan sebagai ancaman. Gagasan Islam Nusantara yang diperkenalkan oleh NU di abad ke-21 juga merupakan kontribusi besar NU dalam mendorong sikap inklusif dan toleran. Konsep ini mengedepankan pemahaman Islam yang moderat dan adaptif dengan budaya lokal, yang menekankan pentingnya menjaga keberagaman dalam bingkai persatuan bangsa. "Islam Nusantara" menjadi antitesis terhadap gerakan-gerakan transnasional yang cenderung membawa ideologi radikal dan intoleran, yang berpotensi mengancam stabilitas sosial dan harmoni antarumat beragama di Indonesia.

NU juga aktif dalam memperkuat dialog antaragama, dengan mengedepankan prinsip saling menghormati dan kerja sama antara umat Islam dengan kelompok agama lainnya. Organisasi ini secara konsisten menolak radikalisasi dan berbagai bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dalam konteks ini, NU menjadi benteng penting dalam memerangi ideologi ekstremis yang berusaha merusak tatanan sosial dan politik Indonesia. Selain itu, NU juga memperkuat basis sosial melalui berbagai organisasi yang dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat, seperti LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah NU) dan LP Ma'arif. LAZISNU berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat dan sedekah, serta mendukung program-program sosial yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Sementara itu, LP Ma'arif berperan dalam pengembangan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang moderat, serta mempromosikan pendidikan yang mengedepankan toleransi, kedamaian, dan persatuan. Melalui berbagai inisiatif tersebut, NU telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memajukan demokrasi dan menciptakan ruang yang aman bagi berbagai kelompok untuk hidup berdampingan dalam harmoni. Dengan pendekatan yang inklusif dan moderat, NU berperan sebagai penjaga toleransi beragama, sekaligus memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada 31 Januari 1926 di Surabaya sebagai respons para ulama pesantren, seperti KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdul Wahab Hasbullah, terhadap ancaman terhadap praktik keagamaan tradisional akibat pengaruh gerakan Wahabi, serta kondisi sosial-politik pada masa penjajahan Belanda. Dengan mendirikan Komite Hijaz dan kemudian NU, para ulama berupaya mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) dan menjaga keberagaman tradisi Islam di Indonesia melalui organisasi keagamaan yang lebih terstruktur. Dalam perjalanan sejarahnya, NU berperan besar dalam pergerakan nasional dengan menolak Volksraad pada era Belanda, memanfaatkan peluang pada masa pendudukan Jepang melalui MIAI dan Masyumi, serta mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 sebagai dorongan moral perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selain berkontribusi dalam perjuangan fisik, NU juga memperkuat solidaritas sosial dan kesadaran politik umat Islam melalui pendidikan dan dakwah, menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan pentingnya keberagaman. Peran NU tidak hanya sebatas di bidang keagamaan, tetapi juga nyata dalam pembentukan identitas nasional Indonesia, penyusunan UUD 1945, dan peneguhan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga NU menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sosial, politik, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Ehwanudin. (2016). Tokoh Proklamator Nahdlatul Ulama: Studi Historis Berdirinya Nahdlatul Ulama. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(2), 447–468.
- Farih, A. (2016). Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri). *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 251. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969>
- Haidar, M. A. (1994). NAHDATUL ULAMA DAN ISLAM DI INDONESIA Pendekatan Fikih dalam Politik. In *Ebp.Aaykpn.Ac.Id*.
- Haris, A., & Dardum, A. (2021). Kiai NU Dan Politik (Keterlibatan Kiai NU Jember Dalam Kontestasi Pilpres 2019). *Fenomena*, 20(1), 91–114. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.51>
- Hidayat, R. (2024). Harmonisasi Pengetahuan: Menelusuri Interaksi Islam dan Filsafat dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(1), 37–53. <https://doi.org/10.19109/el-fikr.v5i1.21680>

- Hidayat, R., Gassing, Q., & Kurniati. (2024). The Hegemony Of Nadhlatul Ulama On Political Dynamics In Indonesia. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 7(1), 56–70. <https://doi.org/10.20414/politea.v7i1.10116>
- Izzatul Fajriyah. (2021). *Jurnal Artefak Vol.8 No.2 September 2021* <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/5454>. 8(2), 119–126.
- KI, M. (n.d.). *NU (Nahdlatul Ulama) : Pengertian, dan Peranannya di Indonesia – Berita dan Informasi*.
- Maghfiroh, A. (2023). Menakar Peran dan Posisi Nahdlatul Ulama dalam Upaya Penguatan Geopolitik Indonesia. *Jurnal Khobar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(2), 97–111. <https://doi.org/10.37092/khobar.v5i2.487>
- Mubin, F. (2020). Sejarah dan Kiprah Nahdlatul Ulama di Indonesia. *Fatkhulmubin90@Gmail.Com*, 3(1), 1–15.
- Nurul Huda. (2025). Peran Strategis NU (Nahdlatul Ulama) dalam Menopang Keberlanjutan Bangsa. *NUMADURA: Journal of Islamic Studies, Social, and Humanities*, 3(2), 63–73. <https://doi.org/10.58790/jissh.v3i2.27>
- Rahim, A. (2013). Nahdatul Ulama. *Jurnal Al-Hikmah*, 14(2), 158–167.
- Romzi, M. (2012). Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama. *RELIGIÓ: Jurnal Studi Agama-Agama (UIN Sunan Ampel Surabaya)*, 2(1), 42.
- Rosila, I., & Khobir, A. (2024). Kontribusi Nahdlatul Ulama dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia Pasca-Kemerdekaan: Sebuah Kajian Sejarah dan Transformasi Sosial. *Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 1, 191–209.
- Saepulah. (2022). Dinamika Peran Gerakan Sosial Keagamaan NU Dalam Merespon Perubahan Sosial. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i1.4>
- Safiuddin, K., Jannah, I. M., & Kunci, K. (2024). Eksistensi Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Partisipasi Politik dan Pemerintahan di Indonesia Informasi Artikel Abstrak. *Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, 2(1), 221–232.
- Sayuti, A., Wasino, W., & Sodik, I. (2018). Dinamika Politik Partai Nahdlatul Ulama di Semarang Tahun 1952-1979. *Journal of Indonesian History*, 7(1), 1–11.
- Syukriyah, L. (2016). Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia (1946-1955). *Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 609–620.

Yatasha, Y., Zuhri, A., & Faza, A. M. D. (2023). Peran Nahdlatul Ulama Dalam Penguatan Nila-Nilai Moderasi Beragama. *Studia Sosia Religia*, 6(2), 49. <https://doi.org/10.51900/ssr.v6i2.18916>